

# DI BALIK EKSISTENSI LOKALISASI DANAU TEMPE: ELIT POLITIK DAN *SHADOW STATE*

Made Widyarini Kusuma Wicitra<sup>1</sup>, I Ketut Putra Erawan<sup>2</sup>, Bandiyah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: [wicitraveda@gmail.com](mailto:wicitraveda@gmail.com)<sup>1</sup>, [ketut.erawan@ipd.or.id](mailto:ketut.erawan@ipd.or.id)<sup>2</sup>, [dyah\\_3981@yahoo.co.id](mailto:dyah_3981@yahoo.co.id)<sup>3</sup>

## ABSTRACT

*The sustainability of the localization business in the Sanur area is an interesting thing in this study by explaining the power of the political elite in the existence of the localization business "Danau Tempe". The theory that the author uses is Barbara Harris White's shadow state theory and Joel S. Migdal's local strongman theory. This result is to explain the power of the political elite in the existence of the localization business of "Danau Tempe." Second, the involvement of the political elite in the localization business of "Danau Tempe". Third, political elites who play a dual role are transformed into a shadow state, namely the founder and supervisor of the United Sanur Youth Association. Fourth, namely the power that underlies the relationship in the localization business of "Danau Tempe".*

**Keywords:** Political Elite, Danau Tempe, Shadow State, Localization

## 1. PENDAHULUAN

Prostitusi di Indonesia sesungguhnya masih menjadi rahasia umum yang disimpan rapat-rapat oleh berbagai kalangan sedangkan di Indonesia memiliki bisnis prostitusi yang terkenal, diantaranya seperti Sarkem, Yogyakarta, Gang Dolly, Surabaya, Saritem, Bandung dan tempat-tempat lainnya. Sementara itu, prostitusi sering dikaitkan dengan sebuah "bisnis lokalisasi" di tempat-tempat tertentu. Lokalisasi sendiri memiliki pengertian bahwa 'melokalisir' suatu aktivitas di suatu tempat sehingga di dalamnya kerap menjadi pelanggaran norma-norma yang seharusnya dianut masyarakat pada umumnya. Lokalisasi yang tujuan awalnya untuk mengumpulkan para pekerja seks komersial (PSK), seiring bertambahnya penduduk, membuat keterlibatan pihak

yang lain. Saat ini, tidak hanya PSK yang terlibat dalam bisnis lokalisasi. Penduduk sekitar, ormas, bahkan pemerintah setempat bisa saja terlibat dalam bisnis lokalisasi tersebut.

Sebagai daerah destinasi wisata, Bali banyak digandrungi oleh wisatawan domestic dan mancanegara yang jumlahnya cukup besar. Berbagai jenis wisata yang ditawarkan, tidak terkecuali dengan bisnis prostitusi. Salah satu bisnis prostitusi yang dimaksudkan adalah Danau Tempe yang terletak di Desa Sanur, Denpasar Selatan. Danau Tempe adalah bisnis lokalisasi "kelas bawah" di Bali. Para PSK beroperasi di bilik-bilik dalam gang yang sempit dengan konsumen yang juga berasal dari kalangan bawah. Tarif yang berlaku dengan kirsan biaya sekitar Rp 50.000

hingga Rp 100.000 (Seru, 2013). Danau Tempe juga dikatakan sebagai salah satu lokalisasi kelas teri yang ada di Denpasar yang cukup terkenal (Fadillah, 2013). Lokalisasi Danau Tempe sering mendapatkan razia oleh satuan polisi pamong praja, namun tragedi tersebut masih tetap berlangsung hingga kini.

Salah satu usaha untuk menekan kegiatan prostitusi, Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2015 tentang ketertiban umum. Dalam perda tersebut dijelaskan tentang: "Penyedia, pengguna, maupun orang yang menawarkan jasa pelacuran dikenakan sanksi pidana dan denda sebesar Rp 50 juta". Namun kemudian kenyataannya, Perda tersebut tidak mampu menghapus kegiatan lokalisasi ini, sebab bisnis lokalisasi Danau Tempe didukung keberadaannya oleh sebagian masyarakat dan dianggap mampu mendukung keberlangsungan ekonomi di sekitar lingkungan Desa Sanur (Wandira, 2019).

Di sisi lain pernyataan yang mengejutkan datang dari Wali Kota Denpasar, Ida Bagus Rai Mantra mengenai tidak adanya lokalisasi resmi di Kota Denpasar. Danau Tempe menurutnya bukan sebuah lokalisasi yang legal karena hanya terdapat satu dan dua pondokan saja (Sukiswanti, 2016). Pernyataan tersebut sangat ambigu sebab di lapangan bisnis

lokalisasi tersebut memang terjadi meskipun tidak memiliki pengakuan. Seperti halnya disangkal oleh Kepala Desa Sanur Kauh, I Made Ada, S. Sos yang menyatakan bahwa tempat-tempat yang dijadikan bisnis prostitusi bisa ditertibkan apabila ada sinergi dari berbagai pihak (Jaya, 2015). Keberlangsungan bisnis lokalisasi tersebut tentunya tidak terlepas dari pemilik lahan, mucikari, dan PSK sebagai pemodal. Mengenai eksistensi bisnis lokalisasi Danau Tempe yang dipercaya sudah ada sejak tahun 1948 juga dianggap tidak terlepas dari beberapa elite politik yang terlibat. Adapun elite politik yang terlibat adalah dari pihak DPRD Kota Denpasar, Griya Delod Pasar Sanur, Kepala Desa, dan Pemuda Sanur Bersatu. Beberapa elite politik inilah yang kemudian memiliki peran sebagai shadow state yang kemudian membuat bisnis lokalisasi Danau Tempe menjadi eksis hingga saat ini. Berdasarkan berbagai uraian singkat maka penulis membuat karya tulis akademik yang berjudul "Kuasa Elite Politik dalam Bisnis Lokalisasi Danau Tempe di Desa Sanur Kota Denpasar" ini menarik untuk dikaji lebih lanjut.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

Kajian pustaka berguna untuk mendukung kelancaran penelitian mengenai Dibalik Bisnis "Danau Tempe

Sanur: Peran Elite politik dan *Shadow State*". Kajian Pustaka penelitian ini terdiri dari: Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Satria Ramadhan, Riswanda dan Ika Arinia Indriyani, (2018) dengan judul "Redefinisi relasi kekuasaan: Fenomena Industri Seks Komersial Di Kota Serang". Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan teori relasi kekuasaan dengan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pendekatan bernuansa fenomenologi berbasis *Participatory Action Research*.

Penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Janif Zulfiqar, Nur Fitriah, Enos Paselle (2014) mengenai "Analsis Kebijakan Penutupan Lokalisasi Prostitusi Km 17 Di Balikpapan." Penelitian tersebut, menggunakan sebuah teori yang bernama patologi sosial.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian oleh Syarif Hidayat (2007) dengan judul penelitian "*Shadow State...? Bisnis dan Politik di Provinsi Banten.*" Kali ini penelitian ini menerapkan teori yang digunakan yaitu *shadow state* William Reno dan Barbara Harris-White. Tujuan penelitian ini adalah berusaha mengungkap perputaran *informal market* yang digawangi oleh para *jawara* di Provinsi Banten. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang hendak

dilakukan adalah obyek dan lokasi penelitian yang berbeda. Beberapa kajian pustaka yang penulis dapatkan dari penelitian-penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa penelitian mengenai Di Balik Eksistensi Bisnis Lokalisasi: Elite politik dan *Shadow State* belum pernah diteliti. Terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya seperti tempat yang akan diteliti, subyek penelitian, waktu penelitian hingga permasalahan yang ingin diangkat. Oleh karena itu, penelitian ini layak untuk dijadikan penelitian dan dilaksanakan guna menambah pengetahuan di bidang ilmu politik khususnya dalam bidang sosial politik.

### 3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dipilih oleh karena sesuai dengan usaha penulis yang berusaha mendeskripsikan dan menganalisis fenomena secara objektif (Ghony & Almanshur, 2012: 13). Patut pula diperhatikan jenis penelitian menggunakan kualitatif deskriptif yang berarti penyajian data berupa kata-kata dan gambar yang didapat dari naskah wawancara serta apapun yang berkaitan dengan penelitian kali ini, yang dapat menggambarkan keadaan dalam bentuk aslinya (Moleong, 2014: 11). Penentuan lokasi merupakan hal penting dalam sebuah penelitian karena melalui lokasi

Danau Tempe, Sanur data akan diperoleh. Pemilihan lokasi menunjukkan komunitas yang akan diamati dan sekaligus kondisi fisik dan sosial mereka (Sutinah & Suyanto, 2007: 171). Penelitian ini berlokasi di Jalan Danau Tempe, Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Provinsi Bali dengan menasar pada pemodal, elite politik (DPRD Kota Denpasar) serta *shadow state* yang terlibat dalam bisnis lokalisasi Danau Tempe.

#### **JENIS DAN SUMBER DATA**

Riset saat ini berupaya menggali peran elite politik dan *shadow state* dalam bisnis lokalisasi Danau Tempe secara terperinci. Oleh karena itu, jenis untuk mengumpulkan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif dari pemikiran Bogdan dan Taylor (dalam Sutinah & Suyanto, 2007: 166) yang nantinya akan berfokus terkait bisnis lokalisasi Danau Tempe. Data tambahan pada penelitian ini didapat dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, artikel, serta data-data lain yang berkaitan dengan peran elite politik dan *shadow state* dalam bisnis lokalisasi Danau Tempe.

#### **PENENTUAN INFORMAN**

Informan kunci pada penelitian ini yaitu tokoh masyarakat yang sekaligus

merupakan elite politik yang memiliki peran penting dalam eksistensi lokalisasi Danau Tempe. Adapun tokoh masyarakat yang dimaksudkan adalah I Wayan Wandira yang sekaligus merupakan elite politik di DPRD Bali. Alasan pemilihan informan tersebut karena dinilai informan memiliki informasi utama dalam penelitian ini terkait dengan perannya sebagai salah satu 'bos lokal' dan kunci utama munculnya *shadow state* dalam eksistensi bisnis lokalisasi Danau Tempe.

#### **TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Observasi sangat penting dilakukan oleh seorang peneliti guna mengetahui karakteristik awal di lapangan serta membantu peneliti dalam upaya merancang penelitian yang akan dilakukan nantinya. Nasution (dalam Sugiyono, 2013: 226). Melalui sebuah observasi, peneliti dapat mengenali keadaan lapangan terlebih dahulu untuk selanjutnya benar-benar mencari data yang akurat. Observasi akan dilakukan selama proses pengumpulan data di lapangan terhadap para informan yang telah ditentukan sebelumnya sehingga penulis mampu menggambarkan serta memaparkan fenomena di lapangan terkait dengan bisnis lokalisasi Danau Tempe. Nantinya kesimpulan yang dipaparkan dalam penelitian, juga didukung oleh data-data yang valid dan konsisten, sehingga kesimpulan yang

dipaparkan adalah kesimpulan yang bersifat kredibel. Data-data tersebut yakni data yang terkait dengan peran elite politik dan *shadow state* dalam eksistensi bisnis lokalisasi Danau Tempe yang terekam didalamnya serta fenomena-fenomena dilapangan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis melakukan wawancara kepada informan telah berpegang pada daftar pertanyaan wawancara yang disusun sebelumnya. Penulis melakukan observasi dan dokumentasi langsung pada masyarakat Desa Sanur Kauh, Denpasar Selatan serta Himpunan Pemuda Sanur Bersatu. Berdasarkan hal tersebut adapun hasil temuan yang diperoleh penulis yang akan diuraikan secara jelas sebagai berikut:

Penulis menemukan bahwa adanya peran ganda yang dimainkan oleh salah satu elite politik yang menjadi wakil ketua DPRD Kota Denpasar, dimana elite politik tersebut juga menjelma sebagai pendiri sekaligus pembina Himpunan Pemuda Sanur Bersatu. Penelitian ini menjadi menarik karena kekuasaan yang dimiliki elite politik yang kerap disapa "Pak Yan" ini sangat mengerucut. Ditambah lagi beliau juga penggagas dan pendiri Banjar Tanjung yang sebelumnya hanya sekaa, hingga dibuatkan balai banjar dan kemudian secara aklamasi ayahnya terpilih sebagai Klian Banjar

Tanjung mulai sejak berdiri hingga sekarang. Penulis melakukan penelitian di salah satu Banjar yang terletak di desa Sanur Kauh yaitu Banjar Tanjung. Sejarah Banjar Tanjung sendiri bermula saat Klian yang bertugas dipilih langsung secara aklamasi dan juga sebagai Bapak dari elite politik I Wayan Maryana Wandhira ST. Sebelumnya diwilayah Banjar Tanjung ini awalnya berupa sekaa bukan banjar. Saat awal terbentuknya Banjar Tanjung yang baru 1-2 tahun yang lalu ini juga mendapat bantuan dana dari tiap banjar lain. Pada Banjar ini penulis menemukan sebuah wisata hiburan. Wisata hiburan yang kebetulan fenomenal dan terletak di Banjar Tanjung ini berbeda dari wisata hiburan seperti yang penulis jelaskan sebelumnya. Wisata hiburan ini merupakan lokalisasi yang sangat dikenal dan sering ramai di pemberitaan media. Berbagai jenis bisnis wisata malam yang ada di Sanur, penulis sangat tertarik melakukan penelitian di Lokalisasi Danau Tempe.

#### **BISNIS LOKALISASI DANAU TEMPE**

Sejarah keberadaan Bisnis Lokalisasi Danau Tempe menurut tokoh masyarakat Sanur yang juga Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali, I Made Arjaya, mengatakan sejarah praktek bisnis pelacuran di kawasan Sanur sejak tahun 1948. Tepatnya di Semawang, dulu di sana ada tempat bernama wisma bahari. Kalau

dulu istilahnya WTS itu penayang, Selanjutnya, dalam perkembangan waktu aktifitas tersebut langgeng berlangsung hingga kini. Terdapat satu lokasi di Danau Tempe yang masih tersisa. Sesungguhnya berkembangnya hotel-hotel tahun 1970 dan 1980, menahan laju dari pertumbuhan praktek prostitusi ini. (Sanur, 2013).

Bisnis yang terletak tepat di gang pertama Jalan Danau Tempe 1 ini sangat menarik perhatian penulis. Pada kesempatan ini penulis masih membutuhkan narasumber lain untuk mendukung keberhasilan penelitian ini. Di hari yang berbeda, penulis bertemu dengan salah satu pemilik warung tuak yang juga menjadi anggota ormas tersebut, guna melakukan wawancara mengenai sejarah dan pengelolaan bisnis tersebut. Menurut beliau keberadaan Bisnis Lokalisasi Danau Tempe tidak hanya ada di gang pertama yang menjadi tempat penulis melakukan penelitian. Menurut penuturan beliau masih ada lagi di beberapa tempat yang juga tidak jauh dari Jalan Danau Tempe 1 ini. Setelah melakukan wawancara dengan pemilik bisnis tersebut penulis kemudian berinisiatif untuk langsung menemui mami yang menjadi pengelola langsung dari dalam. Ia mengaku bahwa ia adalah orang baru disitu jadi tidak tau apa-apa. Beliau hanya bercerita singkat tentang asal nya dan harga yang harus

dibayarkan untuk mengontrak satu kamar serta keuntungan dari bisnis ini. Penulis akhirnya diperbolehkan masuk dan kemudian duduk bersama.

Dapat disimpulkan bahwa ramainya pariwisata di desa Sanur ternyata tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakatnya untuk bergerak dibidang pariwisata saja, namun seperti penjelasan diatas beberapa diantaranya juga yang memilih bisnis lokalisasi. Di sekitar lingkungan bisnis ini, penulis juga mendapati adanya usaha-usaha yang mendukung kelangsungan bisnis tersebut. Masyarakat sekitar juga membuka jasa binatu, kos-kosan, warung sembako, penjual jamu dan obat kuat, penjual minuman keras, penjual bensin, penjual makanan hingga pedagang banten. Penulis akhirnya menemukan narasumber yang kebetulan memiliki warung sembako dan juga kos-kosan untuk di wawancarai perihal dampak dari bisnis lokalisasi tersebut. Saat menuturkan dampak tersebut ternyata narasumber pernah mengalami kejadian tidak mengenakan.

#### **KETERLIBATAN ELITE POLITIK DAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM EKSISTENSI BISNIS LOKALISASI DANAU TEMPE**

Elite politik yang penulis temui seolah menjaga eksistensi bisnis lokalisasi tersebut. Selain alasan sosial dan ekonomi, ternyata elite politik tersebut

juga meninjau lebih jauh jika bisnis lokalitas tersebut ditutup. Menurut beliau, adapun orang-orang yang masih membutuhkan jasa biologis tersebut dan ditakutkan tindak kriminal yang mengancam anak-anak terutama perempuan akan meningkat. Elite politik tersebut tentunya tidak seorang diri dalam memperhatikan bisnis tersebut. Adapun pihak-pihak lain yang juga turut terlibat dalam sisi keamanan. Karena bisnis lokalitas tersebut berada di desa Sanur maka segala keamanan dan ketertiban lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Sanur. Desa Sanur memiliki himpunan yang menjaga keamanan dan ketertiban yang penulis sebutkan diatas. Himpunan tersebut bernama Himpunan Pemuda Sanur Bersatu, atau yang biasa disebut Sanur Bersatu. Selain dari sisi keamanan, terbentuknya Himpunan Pemuda Sanur Bersatu juga memiliki tujuan lain yaitu, memberikan sinergi dari pemuda Sanur demi kemajuan desa Sanur. Dengan kurangnya konsolidasi keamanan kawasan Sanur sendiri merasa tidak nyaman melakukan usaha ataupun aktifitas di kawasan Sanur. Bahkan tidak mustahil para investor akan mencari perlindungan keamanan pada pihak luar sehingga sedikit demi sedikit kawasan sanur akan dipenuhi dan dikuasai oleh para pendatang atau pihak luar yang terjadi pada kawasan lainnya. Himpunan

Pemuda Sanur Bersatu yang di dirikan pada 19 Juni 2005 ini juga memperhatikan dari segi pengembangan usaha khususnya menyangkut pengembangan dan pemeliharaan desa wisata yang dimilikiseperti terbengkalai, tidak terawat dan tidak terkoodinir serta kurang dikelola dengan baik sehingga menjadi tidak jelas mana kepentingan pribadi mana keentingan golongan dan mana kepentingan masyarakat Sanur.

### **ANALISIS HASIL TEMUAN**

Analisis hasil penelitian ini menggunakan teori Shadow State dari Barbara Harris-White. Teori tersebut akan digunakan sebagai dasar teori yang menjadi acuan dalam menganalisis penelitian ini. Pada bab sebelumnya, penulis sudah membahas mengenai hasil temuan terkait penelitian penulis. Terdapat empat hasil temuan penulis yang dibahas, *Pertama* eksistensi bisnis lokalitas Danau Tempe hingga saat ini. *Kedua*, terkait dengan peran elite politik dalam bisnis Lokalisasi Danau Tempe. *Ketiga* adanya kontribusi dari Himpunan Pemuda Sanur Bersatu dalam eksistensi bisnis lokalitas Danau Tempe. Dan yang *Keempat* adanya kekuasaan yang menjadi pengaruh utama di balik Bisnis Lokalisasi Danau Tempe.

Penulis melihat bahwa dari data yang penulis dapatkan dilapangan terlihat jelas pola relasi kekuasaan yang

dibangun antara elite politik yang berperan di balik bisnis lokalisasi Danau Tempe bukan hanya pihak lokalisasi yang mana adapun aktor – aktor yang terlibat seperti pihak griya sanur, elite politik yang memiliki peran ganda sebagai shadow state dimana elite politik juga sebagai pendiri dan penasihat himpunan pemuda sanur bersatu yang sangat berperan penting dalam mendampingi bisnis lokalisasi Danau Tempe tersebut. Selain itu konsep kekuasaan yang sangat kontras dimana elite politik sebagai pembuat Perda No 1 Tahun 2015 tentang larangan kegiatan prostitusi, justru kenyataannya dilapangan ini menjadi sesuatu hal yang dilema. Elite politik justru menyalahkan pemerintah yang tidak memikirkan dampak jika Perda tersebut dijalankan secara optimal. Pada bab sebelumnya, Barbara Harris-White dalam Teori Shadow State mengungkap bahwa dalam penelitiannya di India dalam buku India Working Essays On Society And Economy ada beberapa komponen yang penulis temukan dilapangan. *Pertama*, adanya bisnis keluarga yang tergolong *informal economy*. *Kedua*, adanya peran local state dan shadow state dalam eksistensi bisnis keluarga. *Ketiga*, adanya peran elite politik yang memiliki peran ganda dalam Himpunan pemuda Sanur bersatu yang termasuk dalam shadow state serta beberapa aktor formal lainnya. *Keempat*, kekuasaan yang

menaungi bisnis lokalisasi tersebut hingga tetap eksis hingga sekarang.

Penulis menyimpulkan bahwa dari data yang didapatkan bisnis lokalisasi Danau Tempe ini merupakan sebuah bisnis keluarga. Dimana keluarga ini sangat dipandang dari kastanya yaitu Griya Sanur atau Brahmana yang biasa dikenal sebagai pihak yang memiliki kekuasaan secara kultur dan dituakan serta dianggap suci dan disegani oleh masyarakat menjadi pemilik tanah dan bisnis tersebut secara eksplisit, kemudian untuk menjaga eksistensi bisnis lokalisasi Danau Tempe, mereka juga bekerja sama dengan elite politik yang merupakan panjak atau dianggap memiliki kedekatan khusus yang juga menjelma sebagai shadow state saat elite politik memiliki peran ganda sebagai pembuat Perda No 1 Tahun 2015 dan sebagai pendiri dan penasehat Himpunan Pemuda Sanur Bersatu. Disini dapat dilihat jelas pola relasi kekuasaan secara kultur, kekuasaan politik, kekuasaan masa dan kekuasaan material yang tentu berputar didalamnya. Kemudian yang lebih jelas lagi penulis menegaskan lokasi lokalisasi ini terletak di Banjar Tanjung dimana Orang tua dari elite politik ini menjadi kelian disana secara aklamasi, sehingga ini termasuk dalam lingkungan yang dinaungi oleh elite politik tersebut.

Berdasarkan analisis penulis diatas, keterkaitan bahwa teori Shadow State

menurut Barbara Harris-White yang penulis jabarkan ke dalam 4 temuan mampu membuktikan bahwa adanya peran elite politik dan shadow state di balik eksistensi bisnis lokalisasi Danau Tempe. Elite politik yang merupakan orang kuat local memiliki kekuasaan politik dan material dimana sudah dipercayai selama empat kali berturut-turut menduduki kursi wakil DPRD Kota Denpasar. Serta mendirikan Himpunan Pemuda Sanur Bersatu selain untuk kepentingan keamanan dan menjaga bisnis-bisnis investor yang ada di Desa Sanur.

## **5. KESIMPULAN**

Keterlibatan elite politik formal yaitu Wakil Ketua I DPRD Kota Denpasar sebagai pemegang kuasa tertinggi. Elite politik ini menjadi tumpuan utama. Selain karena kekuasaan politik, kekuasaan material aktor ini dapat dikatakan sebagai local strongman. Hal ini di buktikan dari ia sebagai salah satu tokoh Sanur yang juga mendirikan Himpunan Pemuda Sanur Bersatu dan menjabat sebagai pembina dan pendiri. Adapun dari pihak pejabat desa dan kepolisian yang juga memiliki peran dalam melindungi bisnis lokalisasi Danau Tempe. Peran aktor informal atau shadow state yang juga memiliki peran penting dimana pihak Griya yang menjadi pemilik lahan dan menjalankan bisnis keluarga serta Himpunan Pemuda Sanur

Bersatu yang menjadi bagian keamanan bisnis lokalisasi Danau Tempe dan bisnis-bisnis lainnya yang ada di desa Sanur.

Sehingga temuan menunjukan bahwa adanya pola relasi kekuasaan antara elite politik dan aktor informal dibalik eksistensi bisnis lokalisasi Danau Tempe. Berkaitan temuan dalam study ini, pada akhirnya temuan ini mendukung teori dari Barbara Harris-White tentang shadow state yang beragumen bahwa adanya pola interkorelasi diantara "informal market" dan dari sebuah praktik shadow state dengan merujuk temuan studinya di India pada sekitar tahun 1990. Kemudian lebih dari pada itu penulis menyimpulkan bahwa bisnis lokalisasi Danau Tempe yang menjadi contoh informal market dan aktor informal seperti Himpunan Pemuda Sanur Bersatu sebagai contoh shadow state tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dari tidak optimalnya Perda No 1 Tahun 2015 akibat pola relasi kekuasaan yang terbentuk Di Balik Bisnis Lokalisasi Danau Tempe.

## **SARAN**

Berdasarkan penelitian yang penulis observasi di lapangan mengenai Kuasa Elite Politik Dalam Bisnis Lokalisasi Danau Tempe Di Desa Sanur Kota Denpasar adapun saran yang penulis ajukan yakni sebagai berikut : Elite politik diharapkan bijak dalam menentukan sikap. Dimana sebagai pembuat Perda

seharusnya turut mengindahkan sehingga tercapai cita-cita dari lahirnya Perda itu sendiri supaya tercipta ketertiban social di Kota Denpasar. Yang Kedua Bendesa Adat juga memiliki wewenang dalam menindak dan menutup bisnis lokalisasi Danau Tempe (informal market) dimana Bendesa adat juga perlu turut andil dalam melaksanakan ketertiban social di desa Sanur. Yang Ketiga bagi Himpunan Pemuda Sanur Bersatu, diharap menjaga bisnis-bisnis yang ada dilingkungan Desa Adat Sanur tetapi yang formal dan jelas tujuannya sehingga tidak bertentangan dengan hukum. Yang Keempat bagi masyarakat Desa Sanur diharapkan juga ikut mengawal dalam ketertibas social seperti yang sudah di terbitkan oleh Wali Kota Denpasar. Serta menindak hal-hal yang melanggar norma social yang mampu membawa dampak negative selain dampak positif yang mendukung sektor perekonomian dan yang terakhir adalah saran bagi mahasiswa Ilmu Politik diharapkan ada penelitian lebih lanjut mengenai analisis kekuasaan elite politik, dan shadow state dalam penelitian Kuasa Elite Politik Dalam Bisnis Lokalisasi Danau Tempe Di Desa Sanur Kota Denpasar.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Anshoriy Ch, HM. Nasruddin. (2008). *Bangsa Gagal Mencari Identitas Kebangsaan*. Yoyakarta: LKiS

Ghony, M & Fauzan Almanshur. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Harriss-White B. (2003). *India Working Essays on society and Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.

Hidayat, Syarif. (2007). *Shadow State...? Bisnis dan Politik di Provinsi Banten*, dalam Henk Schulte Nordholt et. al. 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: KITLV-Jakarta

Moleong, Lexy. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ramadhan, Satria., Riswanda., & Ika Indriyany. (2018). *Redefinisi Relasi Kekuasaan: Fenomena Industri Seks Komersial di Kota Serang*. Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan

Rusyidi, Binahayati & Nurwati Nunung. (2018). *Penanganan Pekerja Seks Komersial di Indonesia. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat,*

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutinah & Bagong Suyanto. (2007). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

William (1995) *Corruption and State Politics in Sierra Leone* Cambridge Cambridge University Press

#### **Jurnal;**

Agussalim, Dafri. (1998). Menelusuri Perdebatan Mengenai Konsep Kekuasaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM*. Vol 1: No 3

Amalia, Astry Sandra. (2013). Dampak Lokalisasi Komplek Pekerja Seks Komersial (PSK) Terhadap Masyarakat Sekitar (Studi Kasus Di Jalan Soekarno – Hatta Km. 10 Desa Purwajaya Kabupaten Kutai Kartanegara). *E-jurnal Administrasi Negara*, 1 (2), 465-478.

Septian, Hermawan. 2017. Kekuasaan Seksualitas Dalam Novel: Prespektif Analisis Wacana Kritis Michael Foucault. *Jurnal Unmuh Jember*, 2 (2), 1-15

Zulfiqar, Janif., Nur Fitriah., & Enos Pasella. (2014). Analisis Kebijakan Penutupan Lokalisasi Prostitusi Km 17 Di Balikpapan. *E-Jurnal Administrative Reform*, 2 (1), 1199-1212.

#### **Skripsi :**

Natsir, Roy. 2014. *Kekuatan Politik Danny Pomanto – Syamsu Rizal dalam Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2013* [skripsi]. Makassar: Universitas Hasanuddin.

#### **Internet;**

Bulelengdogen. 2013. Cikal Bakal Lokalisasi di Sanur. Diakses pada 1 September 2019 melalui <https://www.facebook.com/notes/buleleng-dogen/cikal-bakal-lokalisasi-di-sanur/455250117894157/>

Duniagemerlap. 2019. Ada 5 Macam Kelas Prostitusi di Bali. Diakses pada 5 September 2019 melalui <http://duniagemerlap.com/2019/03/17/ada-5-macam-kelas-prostitusi-di-bali/>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/potret-suram-pelacuran-kelas-teri-di-bali.html>

[Sukiswanti, Puji. 2016. Pemkot Denpasar: Danau Tempe Bukan Lokalisasi Legal. Diakses pada 1 Agustus 2019 melalui \[https://news.okezone.com/read/2016/02/21/340/1317615/pemkot-denpasar-Danau Tempe-bukan-lokalisasi-legal\]\(https://news.okezone.com/read/2016/02/21/340/1317615/pemkot-denpasar-Danau-Tempe-bukan-lokalisasi-legal\)](https://news.okezone.com/read/2016/02/21/340/1317615/pemkot-denpasar-Danau-Tempe-bukan-lokalisasi-legal)

